KEAMANAN MARITIM DI PESISIR SELATAN JAWA: STUDI DAN SOSIALISASI PENGELOLAAN BENCANA ALAM DI KAB. PANGANDARAN

Arfin Sudirman, Rizki Ananda Ramadhan, dan Siti Aliyuna Pratisti
Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
E-mail: arfin.sudirman@unpad.ac.id

ABSTRAK,
Program pengabdian masyarakat ini menekankan pada pemaksimalan serta peranan pesisir terluar di Indonesia, yaitu wilayah Pangandaran, dalam strategi pertahanan pemanfaatan pulau-pulau terluar guna menjaga kadaulatan NKRI. Sebagai wilayah yang dekat dengan perbatasan, pulau terluar memiliki potensi ancaman yang lebih tinggi dibanding wilayah lainnya. Salah satu penyebab tingginya potensi ancaman di pangandaran yaitu terkait bencana alam. Tulisan ini mencoba untuk mengkaji pengelolaan wilayah pulau terluar dalam aspek keamanan maritim dan keamanan manusia dari aspek pemberdayaan masyarakat. Diharapkan peningkatkan kekuatan pertahanan dalam hal kehadiran (presence) maupun penangkal (deterrence) melalui strategi pemberdayaan manusia ini dapat menurunkan potensi ancaman di wilayah pesisir, terutama dari ancaman bencana alam.Melalui studi wilayah di pesisir Indonesia, ditemukan salah satu cara efektif untuk menemukan kombinasi kebijakan demi mewujudkan visi keamanan maritim Indonesia, yaitu melalui pemaksimalan aparat pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci: keamanan maritim, wilayah terluar, penanggulangan bencana

MARITIME SECURITY IN JAVA' SOUTHERN COAST: STUDY AND SOCIALISATION ON NATURAL DISASTER MANAGEMENT IN PANGANDARAN DISTRICT

***ABSTRACT*,**
The community service programme emphasises the maximisation and role of the outer coastline in Indonesia, namely the Pangandaran region, in the defence strategy of the outermost islands in maintaining the unity of the NKRI. As a region close to the border, the outermost islands have potential threats that consider higher than other areas. One of the causes of the top potential risk in Pangandaran is related to natural disasters. This paper tries to examine the management of the outermost island areas concerning maritime security and human security from the aspect of community empowerment. It is expected that increasing the strength of the defence and deterrence through social empowerment strategy, can reduce potential threats in coastal areas, especially from the risk of natural disasters. Through the study of outermost coastline in Indonesia, one effective way to find a combination policy was found in realising the vision of Indonesian maritime security, namely through maximising government officials and empowering the community.

Key words: *maritime security, outermost areas, disaster management*

PENDAHULUAN

Kajian pulau dan wilayah terdepan/terluar merupakan gagasan yang tidak lagi dapat dikesampingkan mengingat fungsinya sebagai perbatasan yang mendefinsikan kedaulatan Indonesia. Letaknya yang strategis yang berhadapan langsung dengan negara lain tanpa terhalangi oleh pulau-pulau lainnya menjadikan sejumlah pulau dan wilayah menjadi sangat sensitif terhadap dinamika politik Indonesia baik domestik ataupun internasional. Contoh yang paling mengemuka adalah kasus Sipadan dan Ligitan, juga Pulau Natuna yang belakangan menjadi sorotan karena memiliki letak rentan di penghujung Laut Cina Selatan. Karena kondisi ini, pulau dan wilayah terluat perlu dikelola dengan sangat teliti demi menjaga keutuhan wilayah, mempertahankan keamanan nasional, serta menciptakan stabilitas kawasan. Berbagai cara dapat ditempuh untuk memaksimalkan upaya tersebut, diantaranya melalui pemanfaatkan sumberdaya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan serta pemberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Mengacu pada dua poin utama, yaitu (i) kajian wilayah terluar dan (ii) pemberdayaan masyarakat, yang bersinggungan dengan visi maritim dan strategi Universitas Padjadjaran dalam pengembangan Jawa Barat, maka program Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) dikerucutkan pada Kabupaten Pangandaran yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Sedangkan aspek penanggulangan bencana menjadi perhatian atas dasar dua pertimbangan, yaitu:

1. Sebagai salah satu bagian dari pertahanan maritim yang menjadi vital di Indonesia adalah perihal bencana alam dan mitigasi bencananya. Dalam visi dan misi kelautan Indonesia sekalipun wawasan nusantara berarti kesadaran dan juga pengetahuan akan kondisi geografis Indonesia yang tidak dapat dipungkiri memiliki kerentanan akan adanya bencana alam yang terjadi setiap waktu.
2. Letak dan sejarah Kabupaten Pangandaran yang telah mengalami bencana tsunami menjadi landasan utama dalam pengembangan perbedayaan manusia terkait dengan mitigasi bencana.

Oleh karena itu, melakukan studi wilayah yang memiliki kerentanan tertinggi di pesisir Indonesia merupakan salah satu cara efektif untuk menemukan kombinasi kebijakan demi mewujudkan visi keamanan maritim Indonesia. Pangandaran merupakan salah satu pesisir terluar Indonesia di wilayah selatan dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Tsunami yang terjadi di tahun 2007, serta bencana kekeringan, banjir dan longsor yang terjadi setiap tahunnya menjadikan wilayah ini strategis untuk dijadikan objek dalam Pengabdian Kepada Masyarakat yang bukan hanya menghasilkan output jangka pendek semata, namun jangka panjang di mana riset yang dilakukan dapat dijadikan sebuah referensi dalam penanganan bencana di masa yang akan datang.

Penekanan PPM terkait sosialisasi mitigasi bencana di Kabupaten Pangandaran erat dengan konsepsi *Human Security* yang dikemukakan pertama kali dalam Human Development Report 1994,yang memperluas lingkup keamanan dengan memetaka berbagai ancamanyang juga meliputi ancaman non-militer seperti bencana alam, penyebaran penyakit, kelebihan populasi, pergerakan pengungsi masal, nasionalisme, terorisme, dan nuklir. Konsep keamanan juga kian mendalam sebab lebih menaruh perhatian pada keamanan individu dan kelompok daripada ancaman eksternal terhadap negara (Fierke, 2007: 148). Konsep ini bersinggungan dengan pemberdayaan masyarakat karena tanggung jawab dan implementasi *human security* tidak hanya bisa dilakukan oleh negara. Oleh karena itu, seringkali permasalahan *human security* muncul akibat ketidakmampuan negara dalam memaksilamkan pemberdayaan manusia yang berujung pada sumber ketidakamanan (Fierke 2007, 149). Namun walaupun memiliki kelemahan, negara diperlukan bagi keamanan individu karena tanpa negara menjadi tidak jelas institusi lain apa yang dapat bertindak atas nama individu (Buzan dalam Caballero-Anthony, Mely dan Hasan 2001: 6).Dalam *Security a New Framework of Analysis* (Buzan, Weaver, dan Wilde, 1998: 120) menyatakan bahwa kajian keamanan lingkungan terkait erat dengan *societal security*. Konsep societal security tersebut merupakan sekuritisasi dari permasalahan yang muncul dalam hubungan masyarakat dan negara yang keduanya tidak memiliki perbatasan yang sama. Negara bisa terdiri dari berbagai kelompok masyarakat, atau satu kelompok masyarakat dapat menempati beberapa negara. Dalam hal ini, kelompok masyarakat seringkali muncul dalam unsur identitas kolektif, atau dikenal dengan *identity security*. Konsep *societal security* memperluas cakupan konsep keamanan itu sendiri karena menjadikan unsur identitas kolektif masyarakat sebagai bagian didalamnya.

PPM terkait sosialisasi mitigasi bencana di Kabupaten Pangandaran didasarkan pada kerangka teoritis *human security* di atas. Dalam pelaksanaannya sendiri, terdapat sebuah perubahan tema yang awalnya merupakan "pertahanan pulau terluar" ke "mitigasi bencana" atas dipertimbangkan hasil kunjungan pendahuluan yang mana tim KKNM dan PMM yang melihat relevansi yang cukup kuat mengenai kondisi di kabupaten Pangandaran itu sendiri, tanpa mengesampingkan aspek pertahanan nasional. Maka dari itu, perspektif *human security*diambil untuk mendukung kajian keamanan maritim dan memperluas lingkup pertahanan maritim dari sisi penduduk yang berada di darat beserta ancaman yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari mereka–salahsatunya adalah mitigasi bencana. Dengan mempertimbangkan frekuensi bencana di kabupaten Pangandaran yang cukup tinggi dan dengan melihat hasil observasi lapangan yang dilakukan sebelum pelaksanaan PPM oleh tim, maka perubahan tema ini dilakukan untuk merespons kebutuhan masyarakat akan pengetahuan mengenai mitigasi bencana itu sendiri.

METODE

Dalam kegiatan PPM ini, dua desa dijadikan sampel, yaitu Desa Kalijati dan Desa Pajaten yang berada di Kecamatan Sidamulih, Kab. Pangandaran yang merupakan hasil koordinasi dengan pihak otoritas mitigasi bencana di Kabupaten Pangandaran yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kab. Pangandaran. Kedua daerah ini dipilih atas beberapa rasionalisasi: (1) Desa Kalijati yang dipilih dikarenakan konsentrasi bencana longsor yang paling parah terjadi di daerah ini, dan sempat menjadi perhatian nasional di tahun 2017 hingga mengundang simpati di level menteri negara, dan (2) desa Pajaten yang dipilih karena kondisi kerawanan Banjir yang dimiliki, namun juga memiliki daratan yang cukup stabil di sisi lain daerah ini yang diatur oleh Pemkab sebagai salah satu tempat evakuasi di kala bencana. Sehingga kedua daerah ini dianggap sebagai tempat yang ideal dalam pengambilan data untuk pelaksanaan PPM ini.

Dalam pelaksanaannya, tim PPM didukung oleh keterlibatan mahasiswa KKN yang tergabung dalam program KKNM-intergratif Univeristas Padjadaran. Melalui program ini dapat tercermin keterkaitan yang erat antara KKN mahasiswa dengan riset dan pengabdian dosen. Untuk menjalin kerjasama antar Dosen dan Mahasiswa dibuat mekanisme dan koordinasi melalui tahapan sebagai berikut:

No.	Tahapan
1.	Para peserta KKN mendapatkan arahan yang jelas terlebih dahulu dari tim dosen pembimbing lapangan sebelum memulai berbagai kegiatan;
2.	Peserta KKN bersama dengan Tim Dosen Pembimbing Lapangan Mengunjungi Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kab. Pangandaran untuk memperkenalkan diri dan menjajaki kerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kab. Pangandaran;
3.	Peserta KKN bersama dengan Dosen Pembimbing Lapangan menjelaskan maksud dan tujuan KKN-PPM Integratif ini kepada pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kab. Pangandaran
4.	Tim KKNM-PPMD Integratif Unpad meminta rekomendasi kecamatan atau desa yang rentan terhadap bencana alam di Kab. Pangandaran;

5. Tim KKNM-PPMD Integratif Unpad meminta satu orang dari pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kab. Pangandaran yang akan menjadi Contact Person/PIC kegiatan ini;
6. Tim KKNM-PPMD Integratif Unpad melakukan rurvey ke Kecamatan/Desa yang telah direkomendasikan;
7. Tim KKNM-PPMD Integratif Unpad berkenalan dengan pihak Kecamatan/Desa;
8. Tim KKNM-PPMD Integratif Unpad meminta satu orang dari pihak Kecamatan/Desa yang akan menjadi Contact Person/PIC kegiatan ini;
9. Tim KKNM-PPMD Integratif Unpad mencari rumah warga yang dijadikan base camp KKN mahasiswa untuk kegiatan penelitian/survei;
10. Tim KKNM-PPMD Integratif Unpad meminta data sekunder berupa kebijakan berupa perda, program dan strategi atau RPD mengenai mitigasi bencana yang saat ini dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kab. Pangandaran;
11. Tim KKNM-PPMD Integratif Unpad meminta data sekunder berupa peta kerentanan bencana yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kab. Pangandaran;
12. Tim KKNM-PPMD Integratif Unpad melakukan wawancara kepada pihak bpbd dan pihak koramil;
13. Tim KKNM-PPMD Integratif Unpad melakukan wawancara kepada kepala desa/camat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan pelaku usaha di desa tersebut;
14. Tim KKNM-PPMD Integratif Unpad menyusun data yang tersedia bersertatranskrip wawancara
15. Tim KKNM-PPDM Integratif Unpad menyusun materi untuk pelaksanaan sosialisasi berkoordiansi dengan tim DPL;
16. Tim KKNM-PPDM Integratif Unpad melaksanakan sosialisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses KKNM-PPMD Integratif Unpad 2018 dengan tema "Pertahanan dan Keamanan Maritim Di Pesisir Selatan Jawa: Studi Kasus Mengenai Pengelolaan Bencana Alam Di Kab. Pangandaran" yang dilaksanakan di Desa Kalijati dan Desa Pajaten, Kecamatan Sidamulih, Kab. Pangandaran atas kerja sama antara Universitas Padjadjaran dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kab. Pangandaran.Ada beberapa konteks yang harus dipahami dalam memahami situasi yang terjadi di Pangandaran itu sendiri. Pertama berkaitan dengan kerawanan bencana di Kab. Pangandaran itu sendiri yang mana menurut data yang didapat dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kab. Pangandaran, di tahun 2017 saja, bencana yang terjadi adalah sebagai berikut:

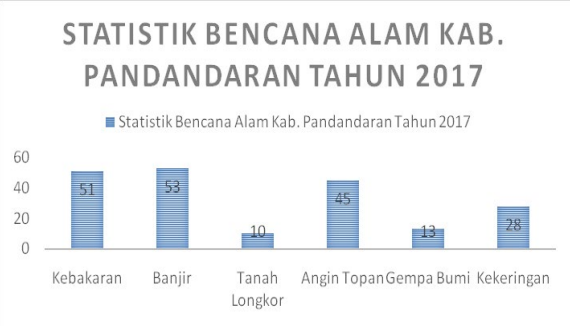

Gambar 1. Statistik Bencana di Pangandaran

Sumber: Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kab. Pangandaran 2018

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa bencana kebakaran terpusat di daerah Kecamatan Kalipucang dengan 28 frekuensi; Banjir terpusat di wilayah Sidamulih dengan 22 frekuensi; Longsor terpusat di wilayah Cijulang, dengan titik kerawanan tertinggi di Desa Kalijati, Kec. Sidamulih; dan Angin Topan dan kekeringan tersebar di seluruh daerah Pangandaran. Tim KKNM-PPMD Integratif Unpad sendiri menggunakan bencana longsor sebagai salah satu bencana yang paling sering terjadi di Pangandaran yang disebabkan karena struktur tanah yang tidak kokoh dikarenakan Pangandaran merupakan wilayah perbukitan yang berada di pesisir pantai yang tidak memiliki struktur geologis yang kuat di dalam tanah. Dengan menggunakan sampel bencana longsor ini. Kami menggunakan peta kerawanan untuk menentukan desa yang akan kami kunjungi, sebagai berikut:

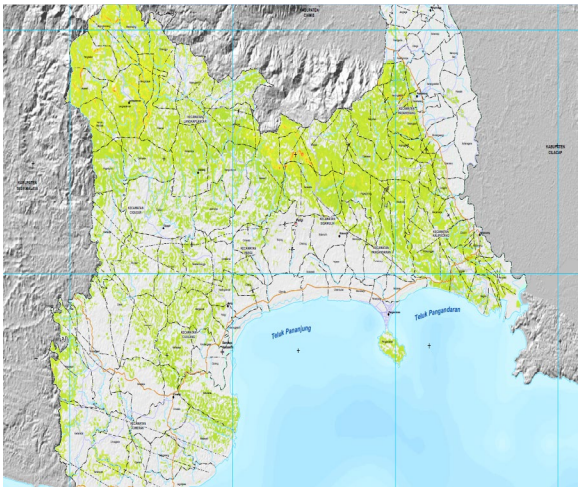

Gambar 2. Peta Kerawanan Bencana Longsor di Kab. Pangandaran

Sumber: Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kab. Pangandaran 2018

Bencana longsor di Pangandaran berada di sekitar Kecamatan Cijulang, Langkaplancar, Padaherang dan Sidamulih. Dengan titik zona merah di perbukitan Desa Kalijati, Kedungwuluh, Karangsari, Cisarua, Langkap lancar, Jayasari, dan Bojongkondang. Penelaahan dan observasi lapangan dilakukan terhadap Desa Kalijati sebagai Zona Merah dan Desa Pajaten sebagai wilayah yang dimungkinkan untuk menjadi wilayah alternatif evakuasi/ relokasi korban bencana. Atas peta kerawanan tersebut, kami menggunakan Desa Kalijati yang pada tahun 2017 mengalami bencana longsor yang mengundang keprihatinan nasional dengan akses jalan yang mati selama beberapa hari. Serta Desa Pajaten yang merupakan salah satu area yang digunakan untuk evakuasi bencana sebagai perbandingan.

Melihat analisis situasi yang ada serta observasi dan wawancara yang telah dilakukan, maka didapat analisis faktor internal dan juga eksternal serta analisis berkaitan dengan strategi yang mungkin dapat dilakukan dalam perbaikan kondisi yang ada. Hasil analisis situasi tersebut dituangkan ke dalam matriks sebagai berikut:

a. ***Faktor Internal***

Kekuatan	1. Adanya pemberitahuan dini sebelum datangnya bencana alam; 2. Ada beberapa desa yang telah dikondisikan untuk menjadi wilayah evakuasi bencana (seperti halnya desa Pajaten) 3. Adanya bantuan yang cepat tanggap di kala darurat dari berbagai pihak, dari level daerah hingga pemerintah pusat (setingkat Menteri) 4. Rehabilitasi pasca bencana di beberapa daerah yang berlangsung cepat; 5. Di daerah rawan bencana, simulasi evakuasi bencana telah sering dilakukan; 6. Pengarsipan log bencana yang baik; 7. *Self-sufficiency* di kala bencana
Kelemahan	1. Akses jalan menuju beberapa desa yang tidak dimungkinkan untuk dilewati pada beberapa kondisi cuaca; 2. Di kala darurat, hanya inisiatif warga yang ada dalam penanganan bencana; 3. Edukasi mitigasi bencana non-formal berbasis pengalaman; 4. Kesalahan *human settlement* yang tidak melihat kondisi geologis tanah; 5. Kekurangan pengetahuan akan kondisi lahan, semua masih berbasis pengalaman 6. Jalanan yang tidak ramah pada beberapa tipe kendaraan; 7. Transparansi mengenai bantuan yang kurang (bahkan aparat desa tidak memiliki data)

b. ***Faktor Eksternal***

Peluang	1. UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Pengetahuan masyarakat yang bisa dikembangkan menjadi perangkat penanganan bencana di daerah lain; 3. Dimungkinkan untuk menjadi tempat edukasi mitigasi bencana; 4. Terbukanya masyarakat terhadap kerja sama; 5. *Hotline* untuk Bencana Alam; 6. Potensi pariwisata di wilayah perbukitan untuk meningkatkan pembangunan; 7. Peta kerawanan bencana yang baik; 8. Pemanfaatan aspek ketahanan masyarakat lokal (Pramuka dan PMR di sekolah menengah, Karang Taruna, dan lainnya**)**
Ancaman	1. Kesulitan akses medik terhadap korban luka berat dan meninggal dikarenakan luasnya daerah dan akses yang sulit; 2. Dalam peta kerawanan daerah berzona merah, jauh dari akses kesehatan dan posko-posko evakuasi, sehingga dimungkinkan terlambatnya akses bantuan kesehatan dan lainnya; 3. Sikap terbiasa yang sewaktu-waktu dapat membahayakan di kala bencana terjadi 4. Truk ukuran besar yang mengangkut material mentah yang merusak jalanan utama

c. ***Realisasi Pemecahan Masalah***

Rencana Pemecahan Masalah diuraikan dalam Matriks Analisa berikut:

	Peluang	**Ancaman**
	1. UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Pengetahuan masyarakat yang bisa dikembangkan menjadi perangkat penanganan bencana di daerah lain; 3. Dimungkinkan untuk menjadi tempat edukasi mitigasi bencana; 4. Terbukanya masyarakat terhadap kerja sama; 5. *Hotline* untuk Bencana Alam; 6. Potensi pariwisata di wilayah perbukitan untuk meningkatkan pembangunan; 7. Peta kerawanan bencana yang baik; 8. Pemanfaatan aspek ketahanan masyarakat lokal (Pramuka dan PMR di sekolah menengah, Karang Taruna, dan lainnya**)**	1. Kesulitan akses medik terhadap korban luka berat dan meninggal dikarenakan luasnya daerah dan akses yang sulit; 2. Dalam peta kerawanan daerah berzona merah, jauh dari akses kesehatan dan posko-posko evakuasi, sehingga dimungkinkan terlambatnya akses bantuan kesehatan dan lainnya; 3. Sikap terbiasa yang sewaktu-waktu dapat membahayakan di kala bencana terjadi 4. Truk ukuran besar yang mengangkut material mentah yang merusak jalanan utama
Kekuatan	**Strategi Kekuatan-Peluang**	**Strategi Kekuatan-Ancaman**
1. Adanya pemberitahuan dini sebelum datangnya bencana alam; 2. Ada beberapa desa yang telah dikondisikan untuk menjadi wilayah evakuasi bencana (seperti halnya desa Pajaten) 3. Adanya bantuan yang cepat tanggap di kala darurat dari berbagai pihak, dari level daerah hingga pemerintah pusat (setingkat Menteri) 4. Rehabilitasi pasca bencana di beberapa daerah yang berlangsung cepat; 5. Di daerah rawan bencana, simulasi evakuasi bencana telah sering dilakukan; 6. Pengarsipan log bencana yang baik; 7. *Self-sufficiency* di kala bencana	- Membuat pusat sistem evakuasi terpadu dengan kerja sama pihak yang terkait; - Meningkatkan sarana prasarana di jalur evakuasi - Memanfaatkan pengalaman masyarakat dalam penelitian untuk membuat perangkat resmi dalam penanganan bencana	- Peningkatan efisiensi operasi mitigasi bencana - Pengembangan hubungan antar-lembaga.

Kelemahan	Strategi Kelemahan-Peluang	Strategi Kelemahan-Ancaman
1. Akses jalan menuju beberapa desa yang tidak dimungkinkan untuk dilewati pada beberapa kondisi cuaca; 2. Di kala darurat, hanya inisiatif warga yang ada dalam penanganan bencana; 3. Edukasi mitigasi bencana non-formal berbasis pengalaman; 4. Kesalahan *human settlement* yang tidak melihat kondisi geologis tanah; 5. Kekurangan pengetahuan akan kondisi lahan, semua masih berbasis pengalaman 6. Jalanan yang tidak ramah pada beberapa tipe kendaraan; 7. Transparansi mengenai bantuan yang kurang (bahkan aparat desa tidak memiliki data)	- Peningkatan edukasi formal dan non-formal; - Meningkatkan kualitas sarana-prasarana; - Pengembangan program pariwisata mitigasi bencana terpadu; - Program pengembangan *human resettlement;* - Lokakarya geologi lahan bagi penduduk di daerah rawan;	- Peningkatan akurasi prediksi bencana alam; - Pemerataan pusat kesehatan di setiap dusun; - Peningkatan kualitas tim *Search and Rescue.*

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Tim PPM mengacu pada analisis diatas. Sosialisasi ditujukan pada dua sasaran utama: (i) terkait aspek *human security* pada Badan Penganggulangan Daerah (ii) terkait aspek mitigasi bencana pada masyarakat umum. Adapun strategi yang ditawarkan tim PPM antara lain:

a. Peningkatan edukasi formal dan non-formal;
b. Meningkatkan kualitas sarana-prasarana;
c. Pengembangan program pariwisata mitigasi bencana terpadu;
d. Program pengembangan human resettlement;
e. Lokakarya geologi lahan bagi penduduk di daerah rawan;
f. Peningkatan akurasi prediksi bencana alam;
g. Pemerataan pusat kesehatan di setiap dusun;
h. Peningkatan kualitas tim Search and Rescue.

Tentu saja, seluruh pelaksanaan kegiatan dan saran di atas memerlukan kerjasama yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat, serta keterlibatan perguruan tinggi dalam pengamalan Tri-Dharma terkait aspek pengabdian kepada masyarakat. Sosialisasi pengelolaan bencana alam di Kabupaten Pangandaran sendiri telah terlaksana dengan memunculkan keberlanjutan baik berupa jurnal ataupun program lanjutan antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi.

SIMPULAN

Kajian pulau dan wilayah terluar membahas mengenai pentingnya memperhatikan, menjaga, dan mengembangkan pulau dan wilayah terdepan/terluar tersebut. Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki kriteria tersebut. Salah satu penyebab tingginya potensi ancaman ini dikarenakan oleh pengelolaan wilayah pulau terluar yang belum dilakukan secara maksimal dalam aspek pertahanan yang kemudian memberikan celah bagi pihak luar untuk mengeksploitasi sumber daya alam maupun menggunakan wilayah nasional Indonesia secara ilegal. Diharapkan peningkatkan kekuatan pertahanan dalam hal kehadiran (presence) maupun penangkal (deterrence) melalui strategi wahana kapal induk ini dapat menurunkan potensi ancaman yang ada serta menegaskan perlindungan terhadap suatu negara yang ditandai dengan terlindungnya kedaulatan, wilayah dan penduduk dari berbagai ancaman yang datang dari luar, termasuk dari ancaman bencana alam.Proses sosialisasi dilakukan dengan kerja sama Tim KKNM-PPMD Integratif Unpad dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kab. Pangandaran di Desa Cimerak, Kab. Pangandaran pararel dengan kegiatan dari Dinas Damkar dalam melaksanakan kegiatan pelatihan Search and Rescue bagi Pramuka SMA/K se Kab. Pangandaran. Kegiatan ini diisi dengan sosialisasi materi yang diberikan oleh Tim DPL serta tim Tanya Jawab yang dipandu oleh mahasiswa KKNM. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu membangun kesadaran akan pentingnya peningkatan dan keterllibatan sumber daya manusia dalam mitigasi bencana.

DAFTAR PUSTAKA

Buzan, Barry, Ole Weaver dan Jap de Wilde, (1998), Security a New Framework of Analysis, Boulder, Lynne Reinner Publisher

Caballero-Anthony, Mely, dan Mohamed Jawhar Hasan (eds.), (2001). The Asia Pacific in the New Millennium: Political and Security Challenges. Kuala Lumpur: Institute of Strategic and International Studies

Dinas Damkar Kab. Pangandaran (2018) Peta Kerawanan Bencana Kab. Pangandaran. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kab. Pangandaran.

Dinas Damkar Kab. Pangandaran (2018) Statistik Bencana Kab. Pangandaran tahun 2017. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kab. Pangandaran.

Fierke, K.M., (2007), Critical Approaches to International Security, Cambridge, Polity Press

Perwita, Anak Agung Banyu. "Redefinisi Konsep Keamanan: Pandangan Realisme dan Neo-Realisme dalam HI Kontemporer" dalam Hermawan, Yulius P (ed). 2007. Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi. Bandung: Graha Ilmu.

Presiden RI. (2017). Perpres No.16 Tahun 2017: Kebijakan Kelautan Indonesia. Kemenko Maritim: Jakarta